**Bidang Ilmu : Ekonomi**

**LAPORAN KEMAJUAN**

**PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**KONSTRUKSI DAN PENERAPAN MODEL GREEN MICROFINANCE DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG BERKELANJUTAN DI KOTA PALEMBANG**

**TIM PENELITI**

**Trisninawati NIDN : 0220076702**

**Andrian Noviardy, S.E., M.Si NIDN : 0203117801**

**Dina Mellita, S.E., M.Ec NIDN : 0206077701**

**UNIVERSITAS BINA DARMA**

**JUNI 2015**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I. Pendahuluan 1

BAB II.Tinjauan Pustaka 3

BAB III. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

BAB IV. Metode Penelitian .. 11

BAB V. Hasil Yang dicapai 13

BAB VI. Rencana Tahapan Selanjutnya .. 19

BAB VII. Kesimpulan dan Saran 20

Daftar Pustaka

**ABSTRAK**

Microfinance atau lebih dikenal dengan pembiayaan mikro atau kredit mikro atau juga dikenal dengan bantuan modal merupakan suatu program pembiayaan lunak yang diperuntukkan bagi kaum miskin dan terbelakang untuk mengembangkan bisnis mereka. Tujuan dari program ini adalah menyediakan suatu bentuk dukungan bagi individu atau kelompok kurang mampu atau miskin (poor atau poorest) yang tertarik meningkatkan kinerja bisnisnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan komunitasnya tanpa membahayakan komunitasnya. Sedangkan green microfinance pada dasarnya sama dengan microfinance konvensional, perbedaannya adalah pembiayaan atau pinjaman lunak dalam skim ini diperuntukan bagi individu maupun kelompok yang bekerja secara langsung mendukung pembangunan sosial dan berwawasan hijau secara berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan yang hijau (green jobs) dan memiliki solusi progresif dan berwawasan lingkungan dalam mengurangi polusi dan kerusakan bumi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan konstruksi dan pengembangan model green microfinance dalam rangka meningkatkan usaha mikro yang berkelanjutan di Kota Palembang. Metode penelitian adalah penelitian terapan dengan tahapan yang pertama adalah membuat model khusus green microfinance untuk lembaga-lembaga microfinance yang ada di Kota Palembang. Tahapan selanjutnya adalah menerapkan model tersebut dengan tujuan untuk menciptakan usaha mikro yang berkelanjutan. Model ini ditujukan untuk pengembangan microfinance yang lebih memperhatikan aspek-aspek lingkungan sehingga tujuan utama dari pembangunan ekonomi yaitu untuk pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: green microfinance, usaha mikro, berkelanjutan

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Microfinance atau lebih dikenal dengan pembiayaan mikro atau kredit mikro atau juga dikenal dengan bantuan modal merupakan suatu program pembiayaan lunak yang diperuntukkan bagi kaum miskin dan terbelakang untuk mengembangkan bisnis mereka. Tujuan dari program ini adalah menyediakan suatu bentuk dukungan bagi individu atau kelompok kurang mampu atau miskin (poor atau poorest) yang tertarik meningkatkan kinerja bisnisnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan komunitasnya tanpa membahayakan komunitasnya. Sedangkan green microfinance pada dasarnya sama dengan microfinance konvensional, perbedaannya adalah pembiayaan atau pinjaman lunak dalam skim ini diperuntukan bagi individu maupun kelompok yang bekerja secara langsung mendukung pembangunan sosial dan berwawasan hijau secara berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan yang hijau (green jobs) dan memiliki solusi progresif dan berwawasan lingkungan dalam mengurangi polusi dan kerusakan bumi.

Pada dasarnya, titik tolak dari green microfinance ini adalah daur ulang (recycle), perbaikan (refine) dan penggunaan kembali sumber daya (reuse resources). Bisnis yang berwawasan hijau (green business) tidak membahayakan lingkungan, disisi lain bisnis jenis ini mengakselerasi sosial pembangunan yang berwawasan hijau (green social development) yang memfokuskan diri pada manusia, meningkatkan kesehatan masyarakat, keadilan sosial, pendapatan serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan mengurangi limbah pada lingkungan. Program ini bukan hanya mencari keuntungan semata, tapi juga mempertimbangkan aspek keseimbangan ekologi antara bisnis, sumber daya, lingkungan dan masyarakat. Bisnis mikro yang berwawasan hijau (green micro business) dapat meningkatkan pendapatan marginal individu dalam rangka untuk bertahan hidup, meningkatkan kualitas hidup serta menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Di Indonesia belum ada lembaga khusus yang menangani pembiayaan bagi usaha mikro. Meskipun keuangan mikro sudah berdiri sejak 100 tahun yang lalu di indonesia, namun sistem pelayanan keuangan yang ada belum efektif dalam memberdayakan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan. Padahal usaha ini menghidupi sebagian besar (hampir 95%) entitas usaha di Indonesia dan dipercaya sebagai aktor ekonomi di masyarakat yang tahan terhadap gejolak krisis nasional dan internasional.

Usaha Mikro yang merupakan sektor informal atau sektor perekonomian Rakyat yang jumlahnya sangat besar. Data yang ada menunjukkan bahwa 70% sektor ekonomi di Indonesia dikuasai oleh sektor informal. Jika tidak diberdayakan akan menciptakan kemiskinan yang lebih besar. Dengan demikian usaha mikro memiliki potensi untuk dapat dikembangkan dan bila diberdayakan secara tepat dan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, akanmeningkatkan skala usaha mereka yang tentunya hal ini akan berdampak pada terciptanya tujuan awal yaitu menghapus kemiskinan di Indonesia serta mengembangkan usaha mikro yang berkelanjutan. Untuk mendorong upaya tersebut, pengembangan green microfinance atau pembiayaan mikro yang berwawasan lingkungan merupakan langkah strategis yang tidak dapat dielakkan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan konstruksi dan penerapan model green microfinance. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menciptakan suatu model green microfinance yang berguna untuk meningkatkan usaha mikro yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

**BAB 2.**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Evolusi Green Microfinance**

Institusi microfinance berkembang dengan cepat sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu disamping untuk mendapatkan tujuan keuangan juga memiliki tujuan pembangunan atau tujuan sosial (Copestake, 2007). Kemudian, tujuan ini berkembang dimana beberapa institusi microfinance mulai mempertimbangkan tujuan ketiga yang berhubungan dengan lingkungan (FMO, 2008; GreenMicrofinance, 2007; Hall, et al, 2008; Rippey, 2009; Schuite & Pater, 2008; Van Elteren, 2007). Sementara tujuan lingkungan secara tradisional diterjemahkan oleh lingkungan usaha sebagai strategi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) (Carroll, 2008). Namun dalam perkembangannya beberapa institusi microfinance telah memulai untuk mengadopsi strategi baru, misalnya merancang suatu produk keuangan yang dapat meningkatkan aktivitas yang lebih ramah lingkungan dan lebih berteknologi. Dalam hal ini institusi melakukan kampanye perilaku-perilaku yang mendukung lingkungan atau melakukan penyaringan (screening) dalam kriteria aplikasi pinjaman yang berbasis lingkungan.

Walaupun terdapat peningkatan kesadaran lingkungan dalam sektor microfinance (Anderson & Locker, 2002), namun sampai saat ini tidak terdapat bukti empiris mengenai karakteristik dari green microfinance dan institusi yang telah menjalankan program ini. Dalam hal ini, konsep green microfinance tidak memberikan hal-hal yang spesifik mengenai pendekatan 3 tujuan diatas dalam semua jenis institusi microfinance. Selain itu, dilapangan institusi keuangan bermasalah dalam menghadapi berbagai variasi dan jenis dari institusi seperti, ukuran, status, kinerja atau misinya.

**2.2 Pentingnya Green Microfinance**

Pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan bisnis yang berwawasan hijau (green business development) pada skala mikro harus memfokuskan diri pada tujuan mencakup ekonomi, sosial dan kepentingan lingkungan. Hal ini dikemukakan oleh Allen dan Thomas (2000), Anderson (2000), Chambers dan Conway (1992), Colbert (2004), Clarke and Clegg (1998), Hick (2004), McDonald dan Oates (2006), Milani (2001), Prahalad dan Hamel (2006), Slayter (2003), Torjman (1998), WECD dan Yunus (2002). Kajian- kajian tersebut menjelaskan bahwa fokus pada tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan elemen-elemen yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, dalam hal ini akan berkontribusi pada ekonomi lokal, pembangunan yang berwawasan hijau (green development), hidup yang berkelanjutan (sustainable livelihood) baik pada level lokal maupun nasional.

Terdapat beberapa alasan mengapa microfinance memiliki relevansi terhadap lingkungan. Pertama, perhatian kepada lingkungan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup dari kaum miskin. Kedua, adanya transformasi dan hubungan teknologi yang berwawasan hijau (green technologies) merupakan hubungan yang ideal dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dan juga akan meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, microfinance merupakan suatu bentuk decentralisasi dari investasi, yang secara total sesuai dengan bentuk desentralisasi hijau dari produksi.

**2.3 Konsep Pemberdayaan**

Konsep *empowerment*, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti “Pemberdayaan“merupakan sebuah konsep yang terbentuk sebagai bagian dari perkembangan ide-ide masyarakat dan kebudayaan barat, utamanya di Eropa.Konsep *empowerment* mulai ada sejak dekade 70-an, dan kemudian berkembang terus secara bertahap selama dekade 90-an dan pada akhir abad ke 20-an. Konsep ini telah menjadi sebuah ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri yang menjadi dasar dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*) (Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (*editor*) : 1996 : 56-57). Ditambah dengan konsep *empower* yang diterjermahkan dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti memberdayakan. Menurut kamus Oxford English ditemukan kata “ *empower*” yang mengandung arti yakni memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain atau keberdayaan (Keppi sukesi dkk : 2002 : 16-17). pendapat Kindervatter mengungkapkan bahwa pemberdayaan merupaka proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik, sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat (Anwar : 2007 : 77) .

Hopson dan Scally menyatakan individu yang lebih berdaya menampakkan sikap-sikap : terbuka kepada perubahan, asertif, proaktif, bertanggungjawab, terarah, sensitif, suka belajar dari kesalahan, berani maju, kekinian, realistik, berpikir relatif, mencari alternatif, mengembangkan komitmen, menghargai dirinya, mengevaluasi orang, peka terhadap masyarakat, menyenangi orang banyak, mengacu ke kehidupan selaras, serasi dan seimbang. Hopson dan Scally juga mengungkapkan bahwa pemberdayaan diri dan kelompok dapat menjadi lebih berdaya dengan mempelajari/pelatihan keterampilan-keterampilan hidup (*life skills training*). Lebih lanjut dalam hal pemberdayaan melalui pembelajaran pelatihan keterampilan-keterampilan hidup (*life skills*) menurut Nadler (1982) mengungkapkan bahwa pelatihan (training) adalah pembelajaran pengembangan individual yang bersifat menDesak karena adanya kebutuhan sekarang. ( Anwar : 2007 : 78 : 103-105).

Menurut Suhendra bahwa pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbetuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya. Selanjutnya pemberdayaan menurut ife pada tahun 1995 adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung *“ empowerment aims to increase the power of disadvantages* atau maksudnya ialah bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung) (Suhendra : 74-77).

Menurut Randy & Riant (2007) sebagai proses, pemberdayaan memiliki tiga tahapan diantaranya yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. 1). Tahap penyadaran :sasaran yang akan diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki sesuatu. Apabila yang menjadi sasaran pemberdayaan tersebut ialah para kelompok miskin, maka kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka bisa menjadi kaum menengah keatas bila mereka memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.Tahap penyadaran ini bisa dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Dengan demikian sasaran memahami bahwa mereka butuh diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka. 2).Tahap pengkapasitasan : pada Tahap ini bahwa Pengkapasitasan (*capacity building*) bisa juga disebut seagai memampukan atau enabling. Hal ini sasaran harus mampu lebih dulu sebelum yang bersangkutan diberi daya atau kuasa. Jadi, pada prinsipnya sasaran agar diberikan lebih dahulu program pemampuan untuk membuat sasaran mempunyai keahlian atau keterampilan (*skillfull*) atau mampu dalam mengelola sesuatu yang akan menjadi sasarannya dalam menerima daya atau kuasa. Proses memampukan sasaran sendiri terdiri dari tiga jenis, yaitu: manusia, organisasi, dan sistem nilai seperti halnya melakukan pelatihan, workshop, seminar, simulasi, dan lainnya. Pada hakekatnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia supaya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.Pengkapasitasan organisasi bisa dilaksanakan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang akan menerima daya. Pengkapasitasan sistem nilai dilaksanakan setelah manusia dan wadahnya dimampukan atau dikapasitaskan. Sistem nilai merupakan aturan main atau *rule of the game*. Pada level organisasi, sistem nilai seharusnya tertuang dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, Peraturan organisasi, dan sejenisnya. Pada level yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika, dan *good governance*. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu sasaran dan membuatkan aturan main (*rule of the game*) di antara mereka sendiri. 3). Tahap pendayaan : pada tahap pendayaan dilakukan dengan cara pemberian daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang atau kesempatan kepada sasaran. Pemberian ini harus disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki sasaran. Pada hakekatnya proses pemberian daya atau kekuasaan harus disesuaikan dengan kecakapan penerima.Selanjutnya untu pemberdayaan perempuan itu menurut pendapat Karl (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembentukan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Menurut Argumen Vargas pada tahun 1991 mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan menyangkut perolehan suara, mobilitas, dan penampilan di depan umum. (Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka, 1996 : 63 ). Kalyanamita mendifinisikan pemberdayaan perempuan adalah penguatan perempuan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, ekonomi dan politik berdasarkan pada keterkaitan antara kebebasan pribadi dan aturan masyarakat yang berlaku (http : // nmc.ppk.or.id diakses tanggal 17 Januari 2012 jam 13.00 WIB ). Menurut Rifai pada tahun 1996 dalam penelitiannya pemberdayaan perempuan merupakan memberikan kemampuan memotivasi perempuan dalam menunjukan wujud sosok perempuan aktor transformasi dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga yang ditopang oleh tiga wujud penampilan mereka, yaitu sebagai dirinya (self), ibu rumah tangga, dan sebagai kader PKK (Anwar : 2007 : 90) Berdasarkan argumen moser, inti dari strategi pemberdayaan (*empowerment*) sebenarnya bukan bertujuan menciptakan perempuan yang lebih unggul daripada laik-laki, namun pendekatan pemberdayaan ini kendati menyadari pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan, tetapi pendekatan tersebut lebih berupaya untuk menidentifikasi pada kekuasaan perempuan bukan sekadar dalam kerangka dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih dalam kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal (Bagong Sugianto dan Emy susanti Hendrarso (penyuting) : 1966 : 154

**2.4 Pemberdayaan Usaha Skala Mikro**

Pemberdayaan usaha kecil dan Menengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia,khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemisikinan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan UKM telah dijalankan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah UMKM pada tahun 2008 mencapai 51,3 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia.

Pemberdayaan usaha mikro ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berusaha dalam skala usaha mikro. Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas bantuan antara lain :

1. Kredit usaha dari danan Surat Utang Pemerintah (SUP-005)
2. Perkuatan permodalan dengan pola kemitraan
3. Linkage program antara Bank Umum dengan Koperasi
4. Pembiayaan produktif konvensional dan syariah
5. Bantuan dana bergulir sektoral
6. Bantuan sarana pasar

**2.4. Road Map Penelitian**

**Konstruksi dan Penerapan Model Green Microfinance Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Berkelanjutan**

**Green Microfinance dan Pemberdayaan Perempuan**

**Green Micro Business: Suatu Model Baru Dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro**

**Peran Pembiayaan Dalam meningkatkan Usaha Mikro**

**Green Microfinance: Kajian Literatur dan Evolusinya**

**Microfinance: Konsep dan tantanganya Bagi pengentasan Kemiskinan**

**Menciptakan Bisnis Mikro Yang Berkelanjutan: Kajian Literatur**

**Trisninawati, S.E., MM**

**Andrian Noviardi, SE., M.Si**

**Dina Mellita, S.E., M.Ec**

**Ikhtisar Green Microfinance Dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Berkelanjutan secara Teoritis**

|  |  |
| --- | --- |
| Evolusi Green Microfinance | Copestake, 2007, FMO, 2008; GreenMicrofinance, 2007; Hall, et al, 2008; Rippey, 2009; Schuite & Pater, 2008; Van Elteren, 2007, Carroll, 2008, Anderson & Locker, 2002 |
| Pentingya Green Microfinance | Allen dan Thomas (2000), Anderson (2000), Chambers dan Conway (1992), Colbert (2004), Clarke and Clegg (1998), Hick (2004), McDonald dan Oates (2006), Milani (2001), Prahalad dan Hamel (2006), Slayter (2003), Torjman (1998), WECD dan Yunus (2002) |
| Konsep Pemberdayaan | Nina Herlina Lubis |
|  |  |

**Studi Pendahuluan**

Dari hasil observasi pendahuluan, diketahui bahwa Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang menangani microfinance. Adapun program-program microfinance berdiri secara mandiri dibawah organisasi-organisasi tertentu atau berada di bawah lembaga keuangan dan perbankan. Selain itu program microfinance yang ada belum berwawasan lingkungan atau belum mengadopsi green microfinance, baik dari sisi target, persyaratan maupun program yang diajukan. Hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi mengenai green microfinance dan manfaatnya baik bagi lembaga maupun kelompok sasarannya.

**BAB 3 .**

**TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

**TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan konstruksi dan penerapan green microfinance dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan di Kota Palembang

**MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memberi masukan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini, yaitu pemerintah daerah dan institusi keuangan terkait serta UKM untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

**BAB 4.**

**METODE PENELITIAN**

**Model Penelitian**

Model penelitian yang digunakan untuk melakukan konstruksi model dan pengembangan program microfinance berbasis ‘green’ adalah penelitian terapan yang berbasis penelitian dan pengembangan. Model ini dilakukan karena penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang permasalahan khusus sehingga dapat membuat keputusan tentang tindakan atau kebijakan khusus. Dalam hal ini peneliti akan melakukan konstruksi model mengenai green microfinance kemudian menerapkan dan mengimplementasikan model tersebut untuk meningkatkan usaha mikro yang berkelanjutan.

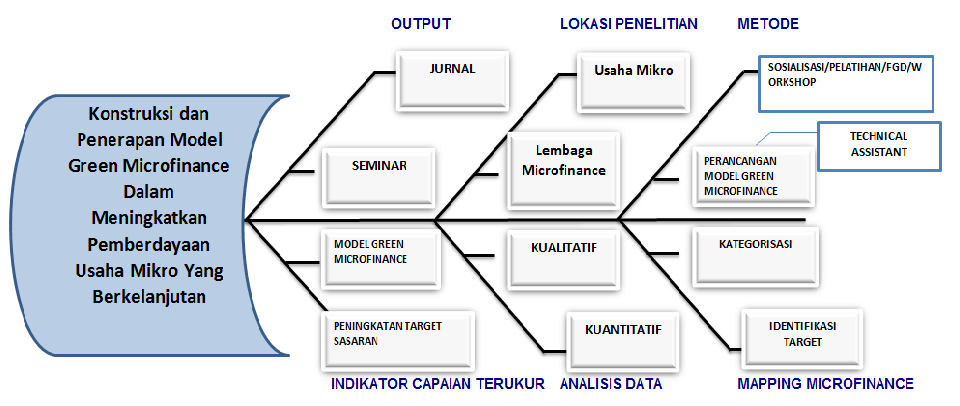
**Bagan Alir Penelitian**

Bagan alir penelitian dibuat untuk mempermudah proses penelitian. Pada penelitian ini akan digunakan fishbone diagram. Fishbone diagram merupakan suatu teknik quality-management yang dapat dipakai untuk mencari faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya masalah (Wycckoff, 2001). Pertama kali yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang mendorong peneltian ini harus dilakukan. Setelah permasalahan dapat diidentifikasi, tujuan dan manfaat penelitian dideskripsikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan ruang lingkup dan batasan penelitian. Pada tahap ini, penentuan populasi penelitian serta komponen-komponen yang berada dalam aspek Model Green Microfinance dilakukan. Setelah populasi diidentifikasi barulah peneliti mengumpulkan informasi tentang populasi yang ditargetkan sehingga dapat ditentukan besarnya sampel yang diikuti dengan pemilihan sampel.

Penentuan model Green Microfinance Untuk usaha Mikro ditentukan berdasarkan penulisan dan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian indikator-indikator dalam kuesioner dibuat dan kajian pilot (pilot study) dijalankan untuk menentukan tingkat kepercayaannya. Setelah mengevaluasi kuesioner, maka akan dibuat suatu model Green Microfinance untuk usaha mikro.

Setelah kuesioner dikumpulkan, data akan dianalisis dan kesimpulan awal dilakukan. Hasil kesimpulan ini kemudian disosialisasikan dengan pihak terkait untuk didiskusikan sehingga akhirnya dapat membuat kesimpulan akhir.

**Bagan Alir penelitian**

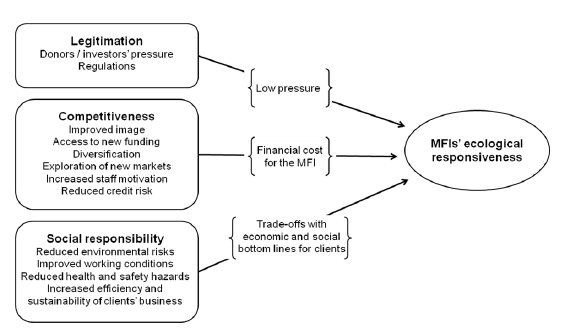
****

**BAB .5**

**HASIL YANG DICAPAI**

Kajian-kajian teoritis dan penelitian terdahulu di kumpulkan dan dianalisis dalam rangkamembangun model green microfinance dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Model green microfinance yang akan dibangun berdasarkan kajian yang dikemukakan oleh Bansal dan Roth (2000). Dalam hal ini, Bansal dan Roth mengidentifikasi tiga penggerak utama Microfinance berwawasan green, yaitu legitimasi (tekanan stakeholder), competitiveness (manfaat strategi dan ekonomi) dan tanggung jawab sosial. Model ini juga dikonfirmasi dengan kajian-kajian lainnya. Wiliamson (2006) mengidentifikasi undang-undang dan kinerja usaha sebagai penggerak utama tanggung jawab ekologi pada perusahaan-perusahaan manufaktur. Lebih lanjut Gonzales-Benito (2005) melakukan wawancara terhadap perusahaan manufaktur dan menemukan bahwa perusahaan tersebut termotivasi oleh persaingan ekonomi yang menyebabkan perusahaan tersebut melakukan transformasi lingkungan

**Model Tanggung Jawab Ekologi Dalam Microfinance**



1. Legitimasi/ Pengesahan

Bansal&Roth(2000) mengidentifikasi legitimasi sebagai motif pertama untuk merespon terhadap ekologi perusahaan. Bagi mereka, legitimasiadalah"keinginan perusahaan untukmeningkatkanketepatantindakannyadalamsebuah kumpulanperaturan, norma, nilai-nilai, ataukeyakinan" (Suchman, 1995). Dengan kata lain,perusahaan merasadipaksa untukgo greenmenanggapiharapanstakeholder'dan mendapatkanlegitimasiyang diperlukan untukkelangsungan hidup jangka panjangmereka.

Di sektorkeuangan mikro, sejumlahpemangku kepentingankeuangan mikro telahmulaimemiliki harapanmengenaitanggung jawab lingkunganLKMmeskipuntekanantidaktampak sangatkuat namunsejauh manadapatmemiliki pengaruh padakeputusanLKM'untuk go green? Dalamberbagai penelitian(Bansal &Roth, 2000;. Céspedesetal, 2003;. Williamsonetal, 2006), legitimasidiidentifikasi sebagaiyang paling berpengaruhuntuktanggap terhadap ekologidi sektormanufaktur. Selanjutnya, Bansal&Roth(2000) menekankan pada legitimasi bahwaperusahaanmanufakturcenderung hanyamengadopsi pendekatanreaktifuntukmematuhi peraturan; merekaberusaha untukmeminimalkan risiko danbiayayangmerekabisa hadapi dengan cara melakukan audit lingkungandan biasanyaperusahaan lain akan mengikuti seperti yang dilakukan salah satu dari perusahaan yang telah menjalankan sektor legitimasi dalam menjalankan green microfinance kemudian untukmenilai apakahhasil yang samaberlaku untuksektor keuangan mikro.

1. Daya Saing

Dalam literaturpadatopikkeuangan mikromengidentifikasidaya saingsebagaimotifutamabagi yang terlibat dalampengelolaan lingkungan. Menurutpenulis yang berbeda, akan green memerlukan manfaat strategis dan keuangan yang jelas untuk keuangan mikro lembaga sendiri. Pertama, dengan menangani isu-isu lingkungan, LKM bisa mendapatkan akses ke pendanaan baru dari investor bertanggung jawab sosial, yang dapat membantu mereka memperluas kegiatan mereka dan akhirnya mengurangi biaya modal mereka (GreenMicrofinance, 2007;. Pikholz, et al, 2005; SEEP Network, 2008; UNEPFI, 2006). Kedua, mereka bisa diversifikasi penawaran mereka, menjelajahi pasar, membedakan dari pesaing dan menarik nasabah dengan mengusulkan produk layanan kredit' yang menarik; misalnya, dengan membantu nasabah untuk meningkatkan produktivitas mereka melalui akses ke teknologi hemat energi atau pelatihan dalam teknik produksi yang berkelanjutan (Araya & Christen, 2004; Hall, et al, 2008;. Schuite & Pater, 2008; SEEP Network, 2008). Ketiga, mereka bisa meningkatkan citra publik dari lembaga mereka, dengandemikian mendorong motivasi karyawan, meningkatkan perluasan pasar, meningkatkan hubungan eksternal dan menghindari risiko reputasi buruk yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan mereka (Hall, et al, 2008;. Rippey, 2009; SEEP Jaringan, 2008; Van Elteren, 2007; Zutshi & Sohal, 2004). Dan keempat, LKM dapat mengurangi risiko kredit dengan pengelolaan risiko lingkungan nasabah. Alasan di sini adalah bahwa risiko lingkungan dapat mengurangi solvabilitas nasabah. Bisnis dapat menjadi tidak berkelanjutan karena menipisnya sumber daya alam; masalah reputasi bisa muncul yang akan mempengaruhi kegiatan; denda bisa dikenakan untuk tidak menghormati peraturan lingkungan; masalah kesehatan mungkin muncul akibat polusi, dll Mengelola risiko lingkungan dari nasabah maka akan menghindari mereka langsung diterjemahkan ke dalam risiko kredit untuk LKM (Coulson & Dixon, 1995; FMO, 2008; Triodos Facet, 2009; UNEPFI, 2006; Van Elteren, 2007).Dalam studi mereka, Bansal&Roth(2000) mengidentifikasidaya saingsebagai tolak ukur untuktanggapterhadap ekologidi sektormanufaktur.

1. Tanggung Jawab Sosial

Ketiga diidentifikasi oleh Bansal & Roth (2000) dalam model mereka adalah tanggung jawab sosial. Hal ini mengacu pada kekhawatiran bahwa perusahaan memiliki nilai kewajiban sosial untuk kebaikan sosial. Perusahaan memutuskan untuk go green karena memilki kewajiban tanggung jawab, atau filantropi, bukan kepentingan pribadi (L'Etang, 1995). Motivasi ini lebih etis, sedangkan faktor legitimasi dan daya saing lebih pragmatis (Bansal & Roth, 2000). Salah satu kekhususan sektor keuangan mikro adalah bahwa inti tanggung jawab sosial LKM diharapkan untuk memenuhi misi sosial mereka: untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang masih rentan kecuali dari perbankan yang berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan. LKM seharusnya didorong oleh keprihatinan etis, sebelum kita mulai mempertimbangkan masalah ekologi.

**Bentuk Layanan Unit Layanan Mikro**

Bentuk layanan yang diberikan Unit Layanan Mikro dalam memenuhi kebutuhan nasabah:

**Reliabilitas Layanan**

Reliabilitas yang dimiliki Unit Layanan Mikro dapat dilihat dari para karyawan yang melayani nasabah di kantor selalu memberikan pelayanan yang baik. karyawan terlihat ramah, sopan, dan mempunyai hubungan baik dengan nasabahnya. Untuk  pelayanan di lapangan atau di luar kantor, pihak Unit Layanan Mikro berusaha memberikan  pelayanan yang cepat dan tanggap. Terlihat dari petugas pemasaran yang berusaha tepat waktu apabila ada permintaan dari nasabah. Pada saat memberikan pelayanan  pihak Unit Layanan Mikro juga berusaha berkomunikasi dengan nasabah agar nasabah merasa nyaman bertransaksi di Unit Layanan Mikro.

**Daya Tanggap Layanan Unit Layanan Mikro**

Daya tanggap yang dimiliki ULM terlihat pada saat memberikan layanan kepada nasabah yang melakukan realisasi terbukti karyawan cepat dalam memproses permintaan nasabah, setelah pemrosesan selesai pencairan dana langsung bisa dilakukan. Pada bagian pemasaran apabila ada nasabah yang tidak  bisa melakukan transaksi di kantor ULM maka pihak pemasaran akan mendatangi nasabah tersebut dan melakukan transaksi di rumah nasabah. Untuk bagian administrasi juga memberikan penjelasan dengan detail dan jelas ketika ada nasabah yang kurang mengerti tentang transaksi juga terkait informasi produk. Dalam melayani nasabah, karyawan juga saling membantu apabila ada nasabah yang belum dilayani maka karyawan yang saat itu tugasnya kosong bisa membantu memberikan pelayanan kepada nasabah.

**Jaminan Layanan ULM**

Karyawan LKM memiliki kemampuan yang berpengalaman di bidangnya, karyawan juga memiliki pengetahuan yang luas dalam memberikan pelayanan. Hal ini dapat dilihat saat nasabah melakukan transaksi pihak karyawan ULM berusaha memberikan suasana nyaman kepada nasabah. Karyawan dalam memberikan  pelayanannya menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh nasabah (Bahasa Indonesia ). Selain itu juga terlihat cara karyawan di kantor saat memberikan pelayanannya dengan sopan, ramah, dan bersahabat namun juga cepat dalam proses transaksi. Hal lain yang dimiliki oleh karyawan ULM adalah reputasi yang baik dan terpercaya oleh nasabahnya.

**Empati Layanan ULM**

Pihak ULM berusaha agar karyawannya untuk cepat dalam memberikan informasi layanan yang dibutuhkan nasabah. Hal ini terlihat ketika ada informasi terkait ULM dan produknya karyawan ULM selalu memberitahu nasabah. Dalam melayani keluhan nasabah, karyawan ULM juga terlihat sangat sabar dan mendengarkan dengan baik, kemudian karyawan berusaha untuk memberikan solusi atau jawaban dari keluhan nasabah dengan cara yang baik. Pihak LKM juga memberikan kemudahan-kemudahan untuk nasabah dengan kebutuhan khusus. Seperti nasabah prioritas diberikan bunga yang relatif ringan dan pencairan dana atau realisasi bisa dilakukan di rumah nasabah.

**Bukti Fisik Layanan ULM**

Bukti fisik yang dimiliki LKM dapat dilihat dari kondisi kantor, fasilitas yang mendukung, dan peralatan yang digunakan. Kondisi kantor ULM terlihat rapi,  bersih, dan tertata dengan baik.

Bukti fisik yang dimiliki juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang dimiliki seperti tempat parkir yang kurang luas dan ruang tunggu nasabah yang kurang memadai. Sedangkan fasilitas yang dimiliki ULM terdiri dari alat transportasi, alat pengolahan data dan pelayanan pelanggan, dan alat komunikasi. ULM memiliki alat transportasi berupa sepeda motor dan mobil yang digunakan untuk melayani nasabah dalam melakukan transaksi di luar kantor. Alat  pengolahan data yang dimiliki ULMberupa komputer dan perangkatnya yang digunakan dalam pengolahan data nasabah. Dalam memudahkan menjalin koordinasi antar pegawai ULM dan cara berkomunikasi dengan nasabahnya ULM  juga dilengkapi dengan alat komunikasi yang berupa telepon dan handphone.

Dengan Model Tanggung Jawab Ekologi pada Microfinance yang dijalankan oleh Bansal dan Roth maka ketiga faktor tersebut dapat dilakukan dalam penerapan yang akan di bangun berdasarkan kajian tersebut. Pihak Perbankan termotivasi karena persaingan ekonomi yang menyebabkan perusahaan tersebut melakukan transformasi lingkungan.Persepsi Perbankan sebagai kreditor dalam memberikan layanan peminjaman kepada UKM (nasabah) dapat menambahkan dalam syarat peminjaman sebagai tanggung jawab sosial dengan lingkungan yang mengarahkan ke green microfinance seperti produk yang dihasilkan dapat menjamin kesehatan atau hygienis, pihak Perbankan dapat memberikan pelatihan seperti bagaimana mendapatkan sertifikat halal dari pihak terkait dalam hal ini Badan Penyuluhan Obat dan Makanan (BPOM).

**BAB 6**

**RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

Tahapan berikutnya yang dilakukan adalah melakukan analisis data dari hasil wawancara tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya mengidentifikasi dan memahami struktur sosial (sistem kelembagaan dan individu) tata hubungan antar lembaga dan atau individu pada lingkungan sosial tertentumengenai microfinance yang berwawasan lingkungan.

**BAB 7**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* 1. Kesimpulan

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa kesulitan yang ditemui tim peneliti. Dalam masalah administratif. Dalam hal ini sangat sedikit perbankan yang berwawasan lingkungan sehingga menyulitkan dalam melakukan survey, pendataan, observasi dan wawancara. Hal lain yang menghambat proses penelitian ini adalah masalah organisasi pelaksana, dimana kesulitannya terletak pada internal team pelaksana kami yang masih belum bisa sepenuhnya dalam management waktu dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan keorganisasian dan kegiatan kampus sering terabaikan begitu saja. Pada masalah organisasi pelaksana ini upaya yang kami lakukan dengan menjadwalkan waktu khusus dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Disisi lain, masalah yang kami hadapi dalam hal keuangan adalah minimnya dana yang disetujui oleh Dirjen Dikti sehingga program kami kurang berjalan secara optimal. Upaya yang kami lakukan adalah mengatur kembali sistem keuangan yang akan direalisasikan.

* 1. Saran

Harus ada program intensifikasi administratif bagi perbankan yang berwawasan green microfinance.

**DAFTAR PUSTAKA**

Araya, M.C. & Christen, R.P.2004) ‘Microfinance as a tool to protect biodiversity hot-spots’. Washington DC: CGAP

Allet, M. (2012a) ‘Measuring the environmental performance of microfinance: a new tool’.*Cost Management* 26(2): 6-17

Allet, M. (2012b) ‘Why do microfinance institutions go green?’. CEB Working Paper N°12/015, Bruxelles: Centre Emile Bernheim

Anderson, L. & Locker, L. (2002) ‘Microcredit, social capital, and common pool resources’.*World Development* 30(1): 95-105

Bansal, K & Roth, P. (2000) ‘Why companies go green: a model of ecological responsiveness’. The Academy of Management Journal 43(4): 717-736

Carroll, A. (2008) ‘Corporate Social Responsibility and Performance’ in Kolb, R. (Ed.) *Encyclopedia of Business Ethics and Society*. London: Sage

Cole, M., Elliotta, R. & Stroblb, E. (2008) ‘The environmental performance of firms: The role of foreign ownership, training, and experience’. *Ecological Economics* 65: 538-546

Copestake, J. (2007) ‘Mainstreaming Microfinance: Social Performance Management or Mission Drift?’ *World Development* 35(10): 1721-1738

GreenMicrofinance (2007) ‘Microfinance and the environment: setting the research and policy agenda’. Roundtable May 5-6, 2006. Philadelphia: GreenMicrofinance-LLC

Gujarati, D. (2004) *Basic econometrics*. New York: McGraw-Hill

GreenMicrofinance(2007 ) ‘Microfinance and the environment: setting the research and policy agenda’. Roundtable May 5-6, 2006. Philadelphia: reenMicrofinance-LLC

Hall, J, Collins, L., Israel, E. & Wenner, M. (2008) ‘The missing bottom line: Microfinance and the Environment’. Philadelphia: GreenMicrofinance-LLC

Lefebvre, E., Lefebvre, L. & Talbot, S. (2003) ‘Determinants and impacts of environmental performance in SMEs’. *R&D Management* 33(3): 263-283

Orlitzky, M., Siegel, D. and D. Waldman (2011) ‘Strategic Corporate Social Responsibility and Environmental Sustainability’. *Business & Society*, 50: 6-27

Orlitzky, M. (2001) ‘Does firm size confound the relationship between Corporate Social Performance and firm financial performance?’ *Journal of Business Ethics*, 33: 167-180

Rippey, P. (2009) ‘Microfinance and climate change: threats and opportunities’. CGAP Focus Note 53, Washington DC: CGAP

Schuite, G.J. & Pater, A. (2008). ‘The triple bottom line for microfinance’. Bunnik: Triodos Facet ss

Situs Internet

http://www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/ITB 75 Articles/ed-NINA%20FIN.doc di akses 30 Juni 2015